

Perencanaan Pengembangan Kawasan Perdesaan Berbasis Potensi Di Kabupaten Bondowoso

(Potential Rural Area Development Planning in Bondowoso District)

Herman Cahyo Diartho¹

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember (UNEJ)

Jalan Kalimantan 37, Jember 68121

¹E-mail: hermancahyodiarto@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kabupaten Bondowoso sehingga dapat ditentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki *ranking* tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Metode skalogram adalah dengan penentuan Indeks Perkembangan Desa (IPD). Model analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penghitungan IPD dilakukan dengan melakukan faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumahtangga atau dilakukan *invers* pada variabel tertentu. Analisis skalogram ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki desa.

Hasil penelitian ini menjelaskan, bahwa : Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa klasifikasi perkembangan desa yang menunjukkan terdapat adanya kegiatan pembangunan yang belum merata di perdesaan, yaitu : (a). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Tamanan dengan potensi ekonomi kreatif menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I (Desa Tamanan, Sukosari dan Wonosuko), (2). Kelompok Hierarki II (Desa Karangmelok, Kemirian, dan Sumberkemuning) dan (3). Kelompok Hierarki III (Desa Mengen, Sumberanom dan Wonosuko). (b). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Wonosari dengan potensi agribis padi organik menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Wonosari, Desa Traktakan dan Desa Sumberkalong), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Kapuran, Desa Pasarejo, Desa Tumeng, Desa Lombok Kulon dan Desa Lombok Wetan) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tangsil Wetan, Desa Jumpang, Desa Pelalangan dan Desa Bendoarum). (c). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Sumberwringin dengan potensi agribis kopi rakyat menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Sumbergading), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Sukorejo dan Desa Sukosarikidul) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tegaljati dan Desa Rejoagung) dan (d). Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Binakal dengan potensi agroindustri tape dan ikan air tawar menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I (Desa Sumbertengah dan Bendelan), (2). Kelompok Hierarki II (Desa Jeruk Sokok, Binakal dan Baratan) dan (3). Kelompok Hierarki III (Desa Gadingsari, Sumber Waru, Kembangan).

Kata Kunci : Perencanaan, Kawasan Perdesaan dan Berbasis Potensi.

Abstract

This study aimed to analyze the relative level of development of keragaan village in Bondowoso so it can be determined the rankings of localities or regions and institutional or on-site service. The assumption is that the area that has the highest rank is the location can become the center of the Ministry. the method skalogram is with the determination of the index of development of village (IPD). It is this analysis of the model used in this study. Counting of IPD is performed by doing the correction factors for any data used. Correction factors, among others, area, population, number of household or done the inverse on the specific variables. Analysis of skalogram is based on facilities belonging to the village.

The results of this study explain that: rural area in the region of Bondowoso has several classifications of the development of the village showed there is a presence of development activities that have not been evenly distributed in rural areas, namely: (a) the relative level of development of Keragaan village in Tamanan Sub creative economy with the potential to produce three hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the village of Tamanan, village of Wonosuko Village and Sukosari), (2). Group II consisted of Hierarchies (Karangmelok Village, Kemirian Village, and Sumberkemuning Village) and (3). Group III consists of the Hierarchy (the village of Mengen, Sumberanom Village and Wonosuko Village). (b) the relative level of development of village Keragaan in District School with the potential to produce organic rice agribis three hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the village School, the village of Traktakan and the village of Sumberkalong), (2). Group II consisted of a hierarchy (the village of Pasarejo Village, Kapuran, village Tumeng, village of Kulon and Lombok Lombok Wetan Village) and (3). Group III consists of a

Hierarchical (Tangsil Wetan Village, Jumpong Village, Pelalangan Village and Bendoarum Village). (c) the relative level of development of Keragaan village in Sumberwringin Sub agribis people's coffee with the potential to produce three hierarchies, i.e. (1). Group I consisted of a hierarchy (village Sumbergading), (2). Group II consisted of a hierarchy (the village of Sukosarikidul and the village of Sukorejo) and (3) Group III consists of a Hierarchy (the village of Tegaljati and the village of Rejoagung), and (d). The relative level of development of Keragaan village in Binakal sub district with the potential of agro-industries and freshwater fish tape produced three hierarchies, i.e. (1). Group I consists of the Hierarchy (the village of Sumbertengah and the village of Bendelan), (2). Group II consisted of a hierarchy (the village of Binakal, village Soksok Oranges and Baratan Villages) and (3). Group III consists of the Hierarchy (the village of Gadingsari, village Resources Waru village of Kembangan).

Keywords : *Planning, Rural Area and Potential Basic.*

Pendahuluan

Pembangunan desa akan semakin menantang di masa depan dengan kondisi perekonomian daerah yang semakin terbuka dan kehidupan berpolitik yang lebih demokratis. Akan tetapi desa sampai kini, masih belum beranjak dari profil lama, yakni terbelakang dan miskin. Meskipun banyak pihak mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi ataupun yang lainnya. (Bappenas, 2012).

Kesenjangan antara kawasan perkotaan dan pedesaan serta kemiskinan di pedesaan telah mendorong upaya-upaya pembangunan di kawasan pedesaan. (Djakapermana, 2003:4).

Kebijakan pembangunan pedesaan selama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dan mempercepat industrialisasi pedesaan. Dalam kaitan tersebut Pradhan (2003) menyatakan bahwa pembangunan pedesaan hanya dapat berkesinambungan apabila fasilitas prasarana dan sarana yang tersedia dapat menstimulasi serta mendorong aktivitas produksi dan pasar di wilayah pedesaan. Pedesaan sebagai pemasok hasil produksi pertanian dalam bentuk produk-produk primer harus didorong menjadi desa-desa yang mampu menghasilkan bahan olahan atau industri hasil pertanian sehingga menjadi kawasan pertumbuhan ekonomi lokal (Gamma Epsilon, 2014).

Penyusunan kebijakan pembangunan pedesaan secara umum dapat dilihat dalam tiga kelompok yaitu : (1) Kebijakan secara tidak langsung diarahkan pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap upaya pembangunan pedesaan yang mendukung kegiatan sosial ekonomi, seperti penyediaan sarana dan prasarana pendukung (pasar, pendidikan, kesehatan, jalan, dan lain sebagainya), penguatan kelembagaan, dan perlindungan terhadap aktivitas sosial ekonomi masyarakat melalui undang-undang. (2) Kebijakan yang langsung diarahkan pada peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan. (3) Kebijakan khusus menjangkau masyarakat melalui upaya khusus, seperti penjaminan hukum melalui perundang-undangan dan penjaminan

terhadap keamanan dan kenyamanan masyarakat (Haeruman, 1997:11).

Menurut Kurnia (1999), upaya untuk melakukan modernisasi dan penguatan ekonomi pedesaan adalah melalui dukungan penyediaan infrastruktur pedesaan seperti jalan, listrik, air bersih dan prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Dalam prakteknya, proses pembangunan pedesaan yang dilaksanakan selama ini belum berhasil mencapai tujuan tersebut, bahkan disisi lain telah menimbulkan berbagai permasalahan baru berupa kesenjangan antar kota dan desa, yaitu perbedaan tingkat kesejahteraan yang menyolok antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mubyarto (2004), bahwa kesenjangan antara sektor industri dengan sektor pertanian itu tampak pada kesenjangan kota – desa.

Pembangunan industri, yang sebagian besar terletak di perkotaan, tumbuh pesat selama hampir 30 tahun. Sebaliknya, pembangunan sektor pertanian dan industri olahannya, yang hampir seluruhnya berada di daerah pedesaan, sangat lambat pertumbuhannya. Sektor pertanian merupakan suatu sistem yang menyeluruh dimana terkait dengan produsen dan konsumen. Sistem ini terkait dengan sub sistem proses penyimpanan, pengolahan hasil, produksi dan pemasaran (CIDA, 2003). Berkembangnya kawasan kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ternyata tidak memberikan efek penetesan ke bawah (*trickle down effect*), tetapi justru menimbulkan efek pengurasan (*back wash effect*) sumberdaya dari wilayah pedesaan ke wilayah perkotaan, serta efek urbanisasi secara cepat.

Zeng dan Sui (2011) menyatakan bahwa hal tersebut merupakan fenomena yang umum terjadi diberbagai negara yang sedang berkembang di dunia. Pembangunan pedesaan melalui pengembangan berbasis agribisnis diharapkan dapat memberikan solusi yang tepat untuk mengatasi dan menjawab berbagai permasalahan tersebut. Pernyataan ini sejalan dengan konsep yang dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Bahkan keduanya menekankan pentingnya pendekatan berbasis agribisnis dalam pengembangan pedesaan di kawasan Asia dan Afrika.

Pengembangan kawasan perdesaan berbasis pada potensi wilayah merupakan hal penting karena nilai tambah dari semua rangkaian produksi pertanian tercipta pada subsistem budidaya, pemasaran dan pengolahan atau agroindustri pedesaan dapat menjadi fase transisi menuju transformasi struktural pertanian keproduksi pertanian sesungguhnya.

Kabupaten Bondowoso merupakan salah satu kabupaten yang mengembangkan konsep pembangunan perdesaan yang berbasis pada potensi desa sebagai salah satu pendekatan dalam memacu pembangunan dan pengembangan wilayah desa. Dilihat dari potensi sumber daya alam dan wilayah, Kabupaten Bondowoso memiliki potensi yang layak dikembangkan bidang pertanian, perikanan dan peternakan. Dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pengembangan wilayah perdesaan maka pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso mempunyai perencanaan strategis untuk memacu perkembangan wilayah perdesaan melalui sasaran utama yang meliputi : (1) Pengembangan pertanian yang berbasis potensi wilayah, dan (2). Pengembangan ekonomi kerakyatan dengan sasaran kawasan pedesaan melalui sektor agribisnis yang berkelanjutan.

Metode

Rancangan atau Desain Penelitian

Analisis skalogram digunakan untuk mengetahui keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kabupaten Bondowoso. Dengan Analisis skalogram ini dapat ditentukan peringkat pemukiman atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Asumsi yang digunakan adalah bahwa wilayah yang memiliki *ranking* tertinggi adalah lokasi yang dapat menjadi pusat pelayanan. Berdasarkan analisis ini dapat ditentukan prioritas pengadaan sarana dan prasarana disetiap unit wilayah yang dianalisis.

Jenis dan Sumber Data

Variabel yang digunakan dalam metode skalogram ini bersumber dari data PODES 2013. (BPS, Republik Indonesia, 2014). Variabel-variabel tersebut mewakili berbagai sumberdaya yang dimiliki setiap desa yaitu : sumberdaya-sumberdaya alam (SDA), sumberdaya buatan (SDB), dan sumberdaya manusia (SDM). Sesuai dengan data yang tersedia, indikator kualitas SDA didekati dengan variabel-variabel operasional sebagai berikut: (1) Kepadatan penduduk (jumlah penduduk per luas desa) dan (2) Posisi desa dalam tata ruang wilayah (jarak pusat desa yang bersangkutan kepusat kecamatan yang membawahi, jarak fasilitas pendidikan dan kesehatan dari pusat desa, jarak pusat desa ke sarana komunikasi dan sarana perekonomian).

Metode Analisis Data

Menurut Priyanto (2010) bentuk lain yang merupakan modifikasi dari metode skalogram adalah dengan penentuan Indeks Perkembangan Desa (IPD). Model analisis inilah yang digunakan dalam

penelitian ini. Penghitungan IPD dilakukan dengan melakukan faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumahtangga atau dilakukan *invers* pada variabel tertentu. Analisis skalogram ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki desa. Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan nilai minimum dan nilai standar deviasinya. Model untuk menentukan IPD suatu wilayah atau pusat pelayanan adalah sebagai berikut :

$$IPD_j = \sum_i^n I'_{ij}$$

$$\text{Dimana: } I'_{ij} = \frac{I_{ij} - I_{i \min}}{SD_i}$$

Keterangan:

IPD_j = Indeks Perkembangan Desa ke-j

I'_{ij} = Nilai indikator perkembangan ke-i terkoreksi/terstandarisasi desa ke-j

I_{ij} = Nilai indikator perkembangan ke-i desa ke-j

I_{i min} = Nilai indikator perkembangan ke-i terkecil

SD_i = Standar Deviasi indikator perkembangan ke-i

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Analisis keragaan perkembangan perdesaan menggunakan data sekunder yang merupakan pengolahan data Sensus Potensi Data (PODES) 2013 yang merupakan PODES terkini yang dilaksanakan BPS. Dalam PODES 2013 dikumpulkan informasi keberadaan, ketersediaan dan perkembangan potensi yang dimiliki setiap wilayah administrasi pemerintahan yang meliputi : sarana dan prasarana wilayah serta potensi ekonomi, sosial, budaya dan aspek kehidupan masyarakat lainnya untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan perencanaan wilayah di tingkat nasional dan daerah (BPS, 2014).

Analisis terhadap keragaan perkembangan perdesaan menggunakan metode analisis skalogram yang bertujuan untuk mengetahui keragaan relatif tingkat perkembangan perdesaan di Kabupaten Bondowoso. Dengan analisis skalogram ini dapat ditentukan peringkat kawasan perdesaan atau wilayah dan kelembagaan atau fasilitas pelayanan. Model analisis inilah yang digunakan dalam penelitian ini. Penghitungan IPD dilakukan dengan melakukan faktor koreksi untuk setiap data yang digunakan. Faktor koreksi antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, jumlah rumah tangga atau dilakukan *invers* pada variabel tertentu. Analisis skalogram ini didasarkan pada fasilitas yang dimiliki desa.

Selanjutnya dilakukan standarisasi dengan nilai minimum dan nilai standar deviasinya.

Model untuk menentukan IPD suatu wilayah perdesaan adalah sebagai berikut:

- a. Hierarki I (Tingkat Hierarki Tinggi) : nilai indeks $> (2 \times \text{Stdev}) + \text{nilai rata-rata}$
- b. Hierarki II (Tingkat Hierarki Sedang) : nilai indeks antara nilai rata-rata dengan $(2 \times \text{Stdev}) + \text{nilai rata-rata}$
- c. Hierarki III (Tingkat Hierarki Rendah) : nilai indeks $< \text{nilai rata-rata}$

Indikator sumber daya buata (SDB) didekati dengan variabel-variabel operasional sebagai berikut :

1. Fasilitas pendidikan dan keterampilan (jumlah TK, SD, SMP, SMA, lembaga keterampilan per jumlah penduduk),
2. Fasilitas kesehatan (jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, praktek dokter/bidang per jumlah penduduk)
3. Fasilitas peribadatan (jumlah masjid/surau/langgar/gereja/kapel/wihara per jumlah penduduk)
4. Fasilitas perekonomian (jumlah industri kecil dan makro, minimarket, toko/warung, warung makan/restoran, koperasi)

Indikator kualitas sumber daya manusia (SDM) didekati dengan variabel-variabel operasional sebagai berikut :

1. Kuantitas penduduk (persentase rumahtangga tani)
2. Kesehatan (jumlah tenaga kesehatan yang menetap per jumlah penduduk, *invers* persentase penderita gizi buruk)
3. Daya beli (*invers* persentase rumahtangga penerima BLT, *invers* banyaknya surat keterangan miskin yang dikeluarkan desa per jumlah penduduk)
4. Keamanan (jumlah tenaga keamanan/Linmas per jumlah penduduk)
5. Aksesibilitas informasi (persentase rumah tangga yang berlangganan telepon kabel).
6. Partisipasi masyarakat (jumlah lembaga non profit seperti: Organisasi Kemasyarakatan, lembaga agama, lembaga pengajian, LSM dll.)

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kabupaten Bondowoso serta mempelajari karakteristik masing-masing kelompok perdesaan. Data perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bondowoso secara spasial g terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok. Pola penyebaran perkembangan perdesaan yang termasuk kelompok I dan II memiliki tingkat perkembangan maju dan sedang pada umumnya berada di tengah kawasan pusat administrasi kecamatan yang merupakan kawasan yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik di Kabupaten Bondowoso. Dengan memiliki aksesibilitas yang cukup baik akan memudahkan masyarakat perdesaan dalam melakukan aktifitas menuju pusat-pusat pelayanan publik dan kegiatan ekonomi.

Bentuk perencanaan pembangunan perdesaan yang berbasis pada potensi wilayah juga menjadi arah dan tujuan dalam pembangunan perdesaan di Kabupaten Bondowoso. Penerapan bentuk perencanaan pembangunan perdesaan dilakukan di wilayah Kabupaten Bondowoso dilakukan berbasis wilayah. Kluster wilayah terhadap pembangunan kawasan perdesaan berbasis potensi wilayah sebagai berikut : (1). Kluster Wilayah Perdesaan Berbasis Ekonomi Kreatif, (2). Kluster Wilayah Perdesaan Berbasis Agribisnis dan (3). Kluster Wilayah Perdesaan Berbasis Agroindustri.

Pembahasan

1. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Ekonomi Kreatif Batik di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso yang mempunyai basis potensi wilayah ekonomi kreatif berbentuk Batik Tamanan. Data perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada tabel dibawah.

Tabel 1. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Kategori Perkembangan Desa
1	Tamanan, Sukosari, Wonosuko	Kelompok Hirarkhi ke I
2	Karangmelok, Kemirian, dan Sumberkemuning	Kelompok Hirarkhi ke II
3	Mengen, Sumberanom dan Wonosuko	Kelompok Hirarkhi ke III

Perkembangan perdesaan yang termasuk kelompok I dan II memiliki tingkat perkembangan maju dan sedang pada umumnya berada di tengah kawasan pusat administrasi kecamatan yang merupakan kawasan yang mempunyai aksesibilitas yang lebih baik di Kabupaten Bondowoso. Adapun kawasan perdesaan yang masuk pada keolompok keragaan III adalah desa yang memiliki tingkat perkembangan rendah.

Karakteristik kelompok keragaan perkembangan perdesaan I dan II ini ditandai dengan tingkat kesejahteraan penduduk paling tinggi dibanding kelompok keragaan III, jumlah sarana pendidikan dan kesehatan memadai yang dapat dilihat dari jumlah sekolah SD, SMP dan SMA serta Puskesmas yang cukup, sarana ekonomi yang perlihatkan melalui jumlah industri kecil/mikro dan pertokoan yang lebih memadai dibanding yang lainnya, kualitas lingkungan paling baik yang ditandai persentase keluarga yang tinggal dilingkungan kumuh lebih kecil dibanding kelompok III, serta partisipasi masyarakat paling tinggi yang dapat dilihat dari jumlah lembaga non profit (organisasi kemasyarakatan, sosial, ekonomi dan agama) lebih banyak dibanding kelompok III, selain itu akses terhadap pusat pemerintahan dalam hal ini kantor camat cukup baik.

Kawasan perdesaan yang masuk pada keolompok keragaan III adalah desa yang memiliki tingkat perkembangan rendah. Adapun ciri-ciri dari kelompok ini berdasarkan hasil analisis kelompok antara lain: tingkat kesejahteraan penduduk yang belum merata, sarana ekonomi kurang memadai dibanding lainnya, kualitas aksesibilitas informasi dan komunikasi terbatas, kesehatan lingkungan keluarga di lingkungan kumuh yang paling tinggi, dan partisipasi masyarakat lebih rendah dibanding lainnya serta akses terhadap pusat pemerintahan paling rendah.

Hasil dari analisis skalogram terhadap perkembangan perdesaan yang berbasis potensi ekonomi kreatif Batik Tamanan di Kecamatan Tamanan di Kabupaten Bondowoso, yaitu :

1. Hierarki I, merupakan wilayah perdesaan dengan tingkat perkembangan maju. Wilayah ini dicirikan oleh indeks perkembangan desa paling tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, terutama sarana pendidikan (sekolah TK, SD, SLTP, SLTA), sarana dan tenaga kesehatan (jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, tenaga kesehatan yang menetap di desa dan sebagainya), sarana komunikasi, sarana perekonomian (industri kecil/makro, pasar permanen, minimarket, koperasi dan lainnya), kualitas pemukiman (*invers* pemukiman kumuh), jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan relatif dekat sehingga untuk mengakses kepusat pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat setiap

desa. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarki I dapat dilihat pada Tabel 1.

Pada umumnya desa yang termasuk dalam hierarki I selain memiliki sarana dan prasarana yang lengkap dibanding hierarki II dan III, mempunyai lokasi dekat pusat administrasi kecamatan, tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi dan aksesibilitas yang baik.

2. Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat perkembangan sedang. Pada hierarki II ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit dari hierarki I dan jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarki II dapat dilihat pada Tabel 1.

Desa-desa pada hierarki II memiliki tingkat kehidupan relatif kurang maju dibanding dengan desa-desa yang ada pada hierarki I terutama terkait dengan aspek budaya.

3. Hierarki III, termasuk Wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Pada hierarki III ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut relatif sangat kurang dan jarak dari masing-masing desa terhadap pusat-pusat pelayanan relatif jauh sehingga untuk mengakses ke pusat-pusat pelayanan relatif lebih sulit dibanding dengan desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarki II dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan peta penyebaran perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Tamanan terlihat adanya pola penyebaran. Kawasan perdesaan yang termasuk dalam kategori perkembangan kurang maju (hierarki III) umumnya berada di ujung selatan Kabupaten Bondowoso. Penyebaran kawasan perdesaan yang termasuk hierarki II tidak menunjukkan pola yang jelas, dengan kata lain beberapa desa di Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso menyebar secara spasial di semua wilayah di Kecamatan Tamanan. Selanjutnya terdapat tiga kawasan perdesaan yang termasuk dalam kategori perkembangan maju (hierarki I) yaitu Desa Wonosuko, Tamanan dan Desa Sukosari.

Pola sebaran terhadap keragaan perkembangan kawasan perdesaan yang berbeda-beda di wilayah Kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso memerlukan metode pendekatan yang beragam dalam mendorong perkembangan wilayah perdesaan berbasis potensi wilayah sebagai dasar perencanaan pengembangan kawasan perdesaan berbasis pada potensi. Oleh karena itu harus dikembangkan formulasi strategi yang bersifat spesifik sesuai dengan keragaan kelompok perkembangan desa masing-masing untuk mewujudkan pertumbuhan yang berimbang dan saling memperkuat antar wilayah perdesaan di Kecamatan Tamanan Kabupaten

Bondowoso, juga didasarkan atas prinsip strategi keterkaitan (*linkages*) antar potensi di setiap kawasan perdesaan. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengembangkan karakteristik fisik kawasan perdesaan dengan membangun berbagai infrastruktur publik.

2. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Agribis Padi Organik di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso yang mempunyai basis potensi wilayah ekonomi agribis padi organik. Data perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada Tabel 2.

Tabel 2 : Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Kategori Perkembangan Desa
1	Wonosari, Traktakan, Sumberkalong	Kelompok Hirarkhi ke I
2	Kapuran, Pasarejo, Tumpeng, Lombok Kulon dan Lombok Wetan	Kelompok Hirarkhi ke II
3	Tangsil Wetan, Jumpong, Pelalangan dan Bendoarum	Kelompok Hirarkhi ke III

Hasil dari analisis skalogram terhadap perkembangan perdesaan yang berbasis potensi agribis padi organik di Kecamatan Wonosari di Kabupaten Bondowoso, yaitu (Tabel 2) :

- Hierarki I, merupakan wilayah perdesaan dengan tingkat perkembangan maju. Wilayah ini dicirikan oleh indeks perkembangan desa paling tinggi dan ditentukan oleh jumlah ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai, terutama sarana pendidikan (sekolah TK, SD, SLTP, SLTA), sarana dan tenaga kesehatan (jumlah puskesmas, puskesmas pembantu, apotik, tenaga kesehatan yang menetap di desa dan sebagainya), sarana komunikasi, sarana perekonomian (industri kecil/makro, pasar permanen, minimarket, koperasi dan lainnya), kualitas pemukiman (*invers* pemukiman kumuh), jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat pelayanan relatif dekat sehingga untuk mengakses kepusat pelayanan tersebut menjadi lebih mudah, serta tingkat kesejahteraan masyarakat setiap desa. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi I dapat dilihat pada Tabel 2.
- Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat perkembangan sedang. Pada hierarkhi II ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit dari hierarki I dan jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada Tabel 2.
- Hierarki III, termasuk Wilayah dengan tingkat perkembangan rendah. Pada hierarki III

ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut relatif sangat kurang dan jarak dari masing-masing desa terhadap pusat-pusat pelayanan relatif jauh sehingga untuk mengakses ke pusat-pusat pelayanan relatif lebih sulit dibanding dengan desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada tabel 5.3.

Pola pendekatan kebijakan yang bersifat spesifik merupakan strategi yang dapat mendorong terwujudnya perencanaan pembangunan perdesaan yang berbasis pada potensi wilayah dengan memperhatikan faktor derajat kelompok perkembangan perdesaan. Pada tabel dibawah menjelaskan karakteristik masing-masing derajat keragaan perkembangan wilayah perdesaan di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso serta arah pengembangan strategis dan terpadu terhadap perdesaan yang berbasis pada potensi wilayah.

3. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Agribis Kopi Rakyat di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso yang mempunyai basis potensi wilayah ekonomi agribis kopi rakyat. Data perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada Tabel 3.

Tabel 3. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Kategori Perkembangan Desa
1	Sumbergading	Kelompok Hirarkhi ke I
2	Sukorejo, Sukosarikidul	Kelompok Hirarkhi ke II
3	Tegaljati, Rejoagung	Kelompok Hirarkhi ke III

Berdasarkan peta penyebaran perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Sumberwringin terlihat adanya pola penyebaran. Oleh karena itu harus dikembangkan formulasi strategi yang bersifat spesifik sesuai dengan keragaan kelompok perkembangan desa masing-masing untuk mewujudkan pertumbuhan yang berimbang dan saling memperkuat antar wilayah perdesaan di Kecamatan Sumberwringin Kabupaten Bondowoso (Tabel 3).

4. Wilayah Perdesaan Berbasis Potensi Agroindustri Tape dan Ikan Air Tawar di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

Hasil analisis terhadap variabel keragaan perkembangan perdesaan salah satunya

menghasilkan skor setiap desa. Tujuan dari analisis kelompok ini adalah untuk membuat pengelompokan (*clustering*) perkembangan desa di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso yang mempunyai basis potensi wilayah agroindustri tape dan ikan air tawar. Data perkembangan kawasan perdesaan di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yang dijelaskan pada Tabel 4.

Pada Tabel 4, hasil dari analisis skalogram terharap perkembangan perdesaan yang berbasis potensi ekonomi kreatif Batik Tamanan di Kecamatan Tamanan di Kabupaten Bondowoso, yaitu :

Tabel 4. Tabel Kategori Perkembangan Desa di Kecamatan Binakal Kabupaten Bondowoso

No	Nama Desa	Kategori Perkembangan Desa
1	Sumbertengah dan Bendelan	Kelompok Hirarkhi ke I
2	Jeruk Soksok, Binakal, Baratan	Kelompok Hirarkhi ke II
3	Gadingsari, Sumber Waru, Kembangan	Kelompok Hirarkhi ke III

- Hierarki II, termasuk Wilayah dengan tingkat perkembangan sedang. Pada hierarkhi II ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana yang tersedia di wilayah tersebut lebih sedikit dari hierarki I dan jarak dari masing-masing wilayah terhadap pusat-pusat pelayanan agak lebih jauh dari hierarki I. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada Tabel 4.
- Hierarki III, termasuk desa dengan tingkat perkembangan rendah. Pada hierarki III ditunjukkan oleh tingkat sarana dan prasarana di wilayah tersebut relatif sangat kurang dan jarak dari masing-masing desa terhadap pusat-pusat pelayanan relatif jauh sehingga untuk mengakses ke pusat pelayanan relatif lebih sulit dibanding dengan desa-desa yang ada pada hierarki I dan II. Kelompok kategori yang masuk dalam hierarkhi II dapat dilihat pada Tabel 4.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dalam kajian ini dapat disimpulkan diantaranya, yaitu :

- Kawasan perdesaan di wilayah Kabupaten Bondowoso mempunyai beberapa klasifikasi perkembangan desa yang menunjukkan terdapat adanya kegiatan pembangunan yang belum merata di wilayah perdesaan, yaitu :
 - Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Tamanan dengan potensi ekonomi kreatif menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Tamanan, Desa Sukosari dan Desa Wonosuko), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Karangmelok, Desa Kemirian, dan Desa Sumberkemuning) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Mengen, Desa Sumberanom dan Desa Wonosuko).
 - Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Wonosari dengan potensi agribis padi organik menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Wonosari, Desa Traktakan dan Desa Sumberkalong), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Kapuran, Desa Pasarejo, Desa Tumeng, Desa Lombok

Kulon dan Desa Lombok Wetan) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tangsil Wetan, Desa Jumpong, Desa Pelalangan dan Desa Bendoarum).

- c. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Sumberwringin dengan potensi agribis kopi rakyat menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Sumbergading), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Sukorejo dan Desa Sukosarikidul) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Tegaljati dan Desa Rejoagung).
- d. Keragaan relatif tingkat perkembangan desa di Kecamatan Binakal dengan potensi agroindustri tape dan ikan air tawar menghasilkan tiga hierarki, yaitu (1). Kelompok Hierarki I terdiri dari (Desa Sumbertengah dan Desa Bendelan), (2). Kelompok Hierarki II terdiri dari (Desa Jeruk Sokok, Desa Binakal dan Desa Baratan) dan (3). Kelompok Hierarki III terdiri dari (Desa Gadingsari, Desa Sumber Waru Desa Kembangan).

Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso terhadap pengembangan kawasan perdesaan dengan basis potensi wilayah, diantaranya sebagai berikut :

1. Mendorong terwujudnya *political will* yang kongkret, yaitu dengan mengatur kebijakan tentang perkembangan kawasan perdesaan berdasarkan potensi setiap wilayah karena memang masing-masing desa tentu memerlukan penanganan yang berbeda.
2. Merealisasikan instrumen yang dapat membangun keterkaitan antar komunitas masyarakat perdesaan, institusi dan partisipasi aktif semua *stakeholder* dalam mendorong perkembangan potensi setiap desa. Selain instrumen juga meningkatkan penyebaran berbagai macam infrastruktur desa baik itu infrastruktur ekonomi lokal, pendidikan, kesehatan, transportasi dan komunikasi agar akses masyarakat pada pusat pelayanan publik menjadi lebih lancar
3. Mendorong terwujudnya daya dukung dan partisipasi aktif dari para pihak yang terkait dengan perkembangan kawasan perdesaan di Kabupaten Bondowoso, diantaranya yaitu :
 - (a). Melaksanakan pelatihan kepada masyarakat
 - (b). Memberikan bantuan modal berupa pinjaman lunak kepada masyarakat yang akan membangun dan mengembangkan usaha rumah tangga,
 - (c). Memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses produksi.

Referensi

- Anonim. 2014. **Best Practices in Rural & Small Town Economic Development**. Rick Hundey Management and Planning Services. Canada
- Anonim. 2012. **Rural Economic Development Initiative (REDI)**. Division of Community Development Florida Department of Economic Opportunity. Florida.
- Allen, John C, Rebecca Filkins and Sam Cordes. 2000. **Alternative Development Strategies for Rural Communities: Views from the Great Plains**. Department of Agricultural Economics, University of Nebraska-Lincoln. Washington DC.
- Anwar, A. 2005. **Ketimpangan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan (Tinjauan Kritis)**. P4WPress. Bogor
- Rifai, S. A. 1989. **Akuakultur dan Lingkungan. Makalah disajikan dalam seminar Industri dan Lingkungan Hidup**. Palembang 20-21 Juni 1989.
- Bourgeois, R dan F. Jesus. 2004. **Participatory Prospective Analisis**. Exploring and Anticipating Challenges with Stakeholders. UNESCAP-CAPSA. Bogor.
- Cohen, M., John. Uphoff, T., Norman. 1977. **Rural Development Participation: Concepts and Measures for Project Design, Implementation and Evaluation**. Ithaka. Cornell University
- Collier, W.L., Santoso, K. 1996. **A New Approach to Rural Development in Java: Twenty Five Years of Village Studies**. Sajogyo (penerjemah). Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama Dua Puluh Lima Tahun, Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Connell, D.J., Wall, E. 2004. New Rural Economy: Economic Capacity Profile. *Journal of Extension*. Volume : 42, Number : 4, diunduh dari: <http://www.joe.org/joe/2004august/a2.php>. Agust 2011.
- Creswell, J.W. 2010. **Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches**. Achmad Fawaid (penerjemah). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Caporaso, J.A., Levine, D.P. 2008. **Theories of Political Economy**. Suraji (penerjemah). Teori-Teori Ekonomi Politik, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Carroll, M.C., Stanfield, J.R. 2003. Social Capital, Karl Polanyi, and American Social and Institutional Economics. *Journal of Economic Issues*. Vol. XXXVII, No. 2 June: 397-404
- Coleman, J.S. 2010. **Foundations of Social Theory**. Imam Muttaqien dkk. (penerjemah). Dasar-Dasar Teori Sosial, Nusa Media. Bandung.
- Collier, P. 2010. The Political Economy of Natural Resources. *Social Research*. Vol. 77, No. 4 Winter: 1105-1132.
- Deolalikar, et.al. 2002. **Poverty Reduction and the Role of Institutions in Developing Countries**. ERD Working Paper. No. 10 Asian Development Bank.
- Dequech, D. 2002. The Demarcation between the "Old" and the "New" Institutional Economics: Recent Complications, *Journal of Economic Issues*. Vol. XXXVI, No.2 June: 565-572.
- Fukuyama, F. 2005. **The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order**. Masri Maris (penerjemah). Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Friedmann, John and Douglass. 1978. **Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Planning in Asia**.

- Glasson, John. 1974. **An Introduction to Regional Planning**. Hutchinson Educational, London.
- Giddens, A. 2010. **The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration**. Maufur dan Daryatno (penerjemah). Teori Struktural: Dasar-Dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Gluscock, A. P., Kutzik, D. M. 2010. The Capital Use of Social Capital or How Social Capital is Used to Keep Capital Concentrated. *International Journal of Social Inquiry*, Vol. 3, No. 2: 101-119.
- Gregg, S. 2010. Smith Versus Keynes: Economics and Political Economy in the Post-Crisis Era. *Harvard Journal of Law & Public Policy*, Vol. 33, No. 2 Spring: 443-464.
- Gregory, P., Stuart, R. 1998. **Comparing Economic Systems in the Twenty-First Century**, Houghton Mifflin Company. USA.
- Hill, H. 1996. **The Indonesian Economy Since 1966: Southeast Asia's Emerging Giant**. Anggito Abimanyu (penerjemah). Transformasi Ekonomi Indonesia Sejak 1966: Sebuah Studi Kritis dan Komprehensif, Pusat Antar Universitas (Studi Ekonomi) UGM dan Tiara Wacana. Yogyakarta.
- Miles, M.B., Huberman, A.M. 1992. **Qualitative Data Analysis**. Tjetjep Rohendi Rohidi (penerjemah). Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.
- Miller, B. 1992. Collective Action and Rational Choice: Place, Community, and the Limits to Individual Self-interest, *Economic Geography*, Vol. 68, No. 1, January: 22-42.
- Min, H. 2011. Former Officials and Subsidies to State-Owned Enterprises, *Journal of Economic Development*, Vol. 36, No. 2, June: 1-13.
- Muhadjir, N. 2002. **Metodologi Penelitian Kualitatif**, Rake Sarasin. Yogyakarta.
- Munawar. 2007. **Kritik Sosiologis Terhadap Kedudukan Individu Dalam Bangunan Teori Ekonomi Neoklasik**, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya. 10 Desember.
- Naghavi, M. A. S., Salavati, A., and Movahed, E. S. B. 2011. Public Sector Success in Social Capital: A Comparative Study in Iran's Governmental and Private Banks, *European Journal of Social Sciences*, Vol. 24, No. 1: 33-41.
- Osborne, D., Gaebler, T. 1996. **Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector**. Abdul Rosyid (penerjemah). Mewirasahakan Birokrasi: Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik, Pustaka Binaman Pressindo. Jakarta.
- Osborne, D., Plastrik, P. 2000. **Banishing Bureaucracy: the Five Strategies for Reinventing Government**. Abdul Rosyid dan Ramelan (penerjemah). Memangkas Birokrasi: Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha, Penerbit PPM. Jakarta.
- Peukert, H. 2001. Bridging Old and New Institutional Economics: Gustav Schmoller and Douglass C. Nort, Seen with Oldinstitutionalists' Eyes. *European Journal of Law and Economics*. Vol.11, No.2: 91-130.
- Prasad, B.C. 2003. Institutional Economics and Economic Development: The Theory of Property Rights, Economic Development, Good Governance and the Environment. *International Journal of Social Economics*. Vol. 30, No. 6: 741-762.
- Rahardjo, M.D. 2011. **Koperasi Sukses Indonesia**, Kompas. nomor 054 tahun ke-47. 22 Agustus. h.7.
- Rahardjo, S. 2008. **Biarkan Hukum Mengalir: Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum**, Penerbit Buku Kompas. Jakarta.
- Ritzer, G., Smart, B. (eds.). 2012. **Handbook of Social Theory**. Imam Muttaqien dkk. (penerjemah). Handbook Teori Sosial, Nusa Media. Bandung.
- Rutherford, M. 2001. Institutional Economics: Then and Now. *Journal of Economic Perspectives*. Vol.15, No. 3 Summer: 173-194.
- Samuels, W.J. 2000. Institutional Economics after One Century. *Journal of Economic Issues*. Vol. XXXIV, No.2 June: 305-315.
- Sen, A. 2007. **Identity and Violence: The Illusion of Destiny**. Arif Susanto (penerjemah). Kekerasan dan Ilusi tentang Identitas, Marjin Kiri. Serpong-Tangerang.
- Skousen, M. 2006. **The Making of Modern Economics: The Lives and Ideas of Great Thinkers**. Tri Wibowo Budi Santoso (penerjemah). Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern: Sejarah Pemikiran Ekonomi, Prenada Media. Jakarta.
- Smelser, J. 1987. **The Sociology of Economic Life**. Hisymi Ali (penerjemah). Sosiologi Ekonomi, Bahana Aksa. Jakarta.
- Sobel, J. 2002. Can We Trust Social Capital?. *Journal of Economic Literature*. Vol. XL March: 139-154.
- Srinivasan, T.N. 2000. The Washington Consensus a Decade Later: Ideology and the Art and Science of Policy Advice. *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, No. 2: 265-270.
- Stiglitz, J.E. 2003. **The Roaring Nineties: A New History of the World's Most Prosperous Decade**. Aan Suhaeni (penerjemah). Dekade Kesenakahan: Era '90-an dan Awal Mula Petaka Ekonomi Dunia, Marjin Kiri. Serpong-Tangerang.
- Vel, J. 2010. **The Uma-Economy: Indigenous economics and development work in Lawonda, Sumba (Eastern-Indonesia)**. Myrne Tehubijuluw-Umbroh (penerjemah). Ekonomi-Uma: Penerapan adat dalam dinamika ekonomi berbasis kekerabatan, HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV. Jakarta.
- Wallis, J., Kilerby, P., Dollery, B. 2004. Social Economics and Social Capital. *International Journal of Social Economics*. Vol. 31 No. 3: 239-258.
- Wasistiono, S., Tahir, M.I. 2007. **Prospek Pengembangan Desa**, Fokusmedia. Bandung.
- Woolcock, M., Narayan, D. 2000. Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy. *The World Bank Research Observer*, Vol. 15, No. 2: 225-249.